

Reshuffle Kabinet

Satu lagi hal yang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini, ialah tentang reshuffle kabinet. Kebijakan itu sebenarnya adalah hak prerogratif presiden. Apakah presiden berkehendak meresuffle kabinetnya atau tidak, adalah merupakan urusannya sendiri sebagai kepala negara. Oleh karena itu, kalau banyak pihak membicarakannya, maka sebenarnya hanyalah sebatas pandangan yang dianggapnya perlu disampaikan.

Pemicu munculnya wacana tersebut, ada beberapa hal misalnya terkait dengan kesehatan, kasus keluarga, kinerja, dan kasus-kasus korupsi di kementerian tertentu. Untuk menjaga keutuhan bangsa yang sedemikian besar, kiranya tidak mudah mengambil keputusan yang melibatkan banyak kepentingan, seperti perombakan kabinet ini. Merombak kabinet tidak sesederhana sebagaimana merombak benda-benda tak bernyawa. Dampak kebijakan itu biasanya sedemikian luas, dan oleh karena itu pertimbangannya juga tidak boleh hanya dari aspek yang terbatas.

Berbagai komentar tentang reshuffle muncul, mulai dari yang sangat optimis hingga sebaliknya, terlalu pesimis akan adanya perubahan dari kebijakan itu. Sementara orang mengatakan bahwa reshuffle sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai isu tentang korupsi yang sehari-hari diberitakan media massa tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sekalipun penjara sudah semakin penuh, dengan berbagai berita itu menjadikan pemerintah dianggap kurang serius memberantas korupsi.

Persoalan yang menimpa bangsa ini sudah sedemikian besar, banyak, dan kompleks. Wilayah persoalan itu sudah berada di mana-mana. Persoalannya bukan hanya menyangkut ekonomi sebagaimana disebutkan banyak orang, yaitu tentang besarnya jumlah pengangguran dan rendahnya pendapatan. Sebenarnya secara ekonomi, jika dilihat dari beberapa aspek telah mengalami perkembangan. Namun persoalannya bukan semata-mata di wilayah ekonomi. Itulah sebabnya, pemecahannya menjadi tidak mudah.

Dari berbagai persoalan bangsa yang sangat mendasar, dan karena itu sangat membahayakan, adalah adanya krisis kejujuran. Persoalan kejujuran ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat membahayakan. Sebab ketidakjujuran atau kebohongan akan melahirkan persoalan lain yang sedemikian luas dan besar. Biaya sosial sebagai akibat krisis kejujuran sedemikian mahal. Dalam sejarah kehidupan, tidak pernah suatu bangsa runtuh oleh karena faktor ekonomi, politik, hukum dan sejenisnya. Tetapi bangsa akan runtuh manakala terjadi kebohongan-kebohongan. Bangsa Ats, Tsamut, dan Firaun runtuh oleh karena kebohongan itu.

Oleh karena itu, kalau ada sementara orang bersikap pesimis terhadap kebijakan perombakan kabinet, mungkin mereka melihat bahwa persoalan bangsa ini telah sedemikian besar dan berat. Bahkan persoalan itu menjadi semakin bertambah berat, karena berada pada wilayah yang tidak tampak, -----kecuali pada gejala-gejalannya saja, yaitu adanya krisis kejujuran itu. Banyaknya kasus korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, rendahnya mutu pendidikan dan lain-lain, sebenarnya itu semua terjadi karena krisis kejujuran, kebohongan, manipulasi, kepalsuan, dan sejenisnya.

Sikap tidak jujur, kebohongan, manipulasi dan lain-lain itu ternyata sudah merata di mana-mana, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi negara. Sebagai akibatnya, maka semua persoalan tidak mudah diselesaikan. Sebagai contoh kecil, sekedar untuk menyelenggarakan ujian nasional, diperlukan pengawasan dari eksternal masing-masing sekolah, seperti perguruan tinggi dan

bahkan polisi. Namun tidak berarti polisi dan perguruan tinggi telah teruji kejujurannya, sebab kasus-kasus penyimpangan di kedua institusi tersebut juga sering terdengar. Kasus-kasus adanya plagiaris di berbagai perguruan tinggi adalah juga merupakan contoh krisis kejujuran itu.

Kejujuran adalah persoalan akhlak dan atau kharakter. Karakter atau akhlak bangsa ini harus diperbaiki, sekalipun menjalankannya tidak mudah. Membangun akhlak sama dengan membangun semua orang. Sebab akhlak ada di mana-mana, yaitu ada pada pribadi seluruh warga bangsa ini. Oleh karena itu, andaikan betul, reshuffle kabinet akan dilakukan, maka pilihan tepat para pengganti sebelumnya adalah dengan mempertimbangan akhlak atau kepribadian ini. Membangun akhlak mulia atau karakter yang mulia hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak mulia pula.

Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, -----dalam sejarahnya, masyarakat Arab ketika itu juga sedang mengalami krisis kejujuran. Masyarakat Arab ketika itu, disebut sebagai bangsa jahiliyah. Masyarakatnya selalu berebut kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Mereka yang kuat, itulah yang menang. Sedangkian mereka yang kalah tidak dibantu, tetapi justru ditindas dan bahkan dijadikan budak. Nabi Muhammad hadir dengan membawa akhlak mulia. Sifatnya sebagai orang terpercaya atau disebut *al amien*, olehnya digunakan untuk membangun masyarakat Arab itu dan ternyata berhasil.

Oleh karena itu, maka reshuffle kabinet seharusnya dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki akhlak atau karakter bangsa. Sebab titik lemah bangsa ini sebenarnya ada di wilayah itu. Konsep untuk membangun akhlak atau karakter sudah tersedia. Bangsa Indonesia selama ini disebut sebagai bangsa religius, ber-Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Yang diperlukan adalah pemimpin yang jujur dan menyandang integritas yang tinggi, karena akan mengemban amanah, yaitu memimpin masyarakat agar menjadi jujur dan berakhlak mulia itu. *Wallahu a'lam*.